

# ISU Sepekan

## BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 3 Bulan Januari 2021 (tanggal 15 s.d. 21 Januari)

## PERBAIKI UPAYA PENANGANAN PANDEMI SERTA PELAPORAN DATA COVID-19 DI DAERAH



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Sidiq Budi Sejati  
Peneliti Pertama Bidang Administrasi Publik  
[sidiq.sejati@dpr.go.id](mailto:sidiq.sejati@dpr.go.id)

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Angka kasus penambahan positif Covid-19 terlihat melonjak tinggi secara tiba-tiba merupakan suatu hal yang mengejutkan. Hal ini bisa disebabkan karena jumlah pemeriksaan yang dilakukan di daerah semakin tinggi dan memang semakin banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19. Di samping itu tingkat kepatuhan serta disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang mengendur atau bisa juga dikarenakan keterlambatan verifikasi data oleh pusat akibat penumpukan pelaporan data yang dikirim dari daerah menyebabkan angka positif Covid-19 melonjak tinggi. 'Delay' data ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan kebijakan oleh pusat untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

### FUNGSI DPR

#### Pengawasan:

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat terus mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan peraturan atau kebijakan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia.

### ATENSI DPR RI

- DPR dapat mendorong Kementerian Dalam Negeri agar dapat meminta seluruh Pemda (pemerintah daerah) untuk meningkatkan upaya penanganan penularan pandemi Covid-19 di daerahnya sesuai **Surat Edaran Mendagri No. 903/145/SJ**. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat bekerjasama dengan TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan serta meningkatkan tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankannya.
- DPR dapat mendorong Kementerian Dalam Negeri agar memberi arahan kepada seluruh Pemda untuk menggunakan *swab* antigen dalam melakukan screening di masyarakat dan tidak lagi menggunakan *rapid test* antibodi, hal ini terkait kecepatan akurasi pendeteksian pada masyarakat yang positif terpapar Covid-19. Metode *screening test* yang cepat dengan akurasi tinggi akan mempengaruhi perolehan data kasus Covid-19 yang tepat dan cepat di daerah untuk dikirimkan kepada pusat.
- DPR dapat mendorong Kementerian Dalam Negeri agar dapat meminta seluruh Pemda mulai gencar dalam mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini berguna untuk memerangi *hoaks* tentang vaksin Covid-19 yang beredar di berbagai media dalam masyarakat.

### SUMBER

Kompas.com, 19 Januari-20 Januari 2021. Koran Kompas, 20 Januari 2021.